



**LAPORAN
HASIL
PELAKSANAAN
REFORMASI
BIROKRASI
KELOMPOK KERJA
PENATAAN TATA
LAKSANA
TAHUN 2019**

**LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA
TAHUN 2019**

**TIM
PENGARAH**

**Dr.Ir.Bima Haria Wibisana, M.SIS
(Ketua)**

TIM POKJA PENATAAN TATA LAKSANA

**Paryono, S.H., MAP. (Ketua)
Dr. Elin Cahyaningsih, S.Kom, M.Msi (Anggota)
Sisti Harini, SE (Anggota)
Dewi Fauziyati, S.Psi, MA (Anggota)
Dessy Chrisma Citra Hapsari, S.Kom (Anggota)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan “Laporan Reformasi Birokrasi Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019”. Kami sampaikan pula terima kasih atas bantuan dari seluruh pihak yang telah berkontribusi secara maksimal dalam penyelesaian laporan ini.

Laporan ini menjelaskan mengenai rencana aksi reformasi birokrasi kelompok kerja penataan tata laksana tahun 2018. Adapun rencana aksi yang telah direncanakan meliputi Proses Bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), E-Government dan Pelayanan Publik di Badan Kepegawaian Negara.

Kami berharap Laporan Reformasi Birokrasi Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana Badan Kepegawaian Negara Tahun 2019 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik pengambil kebijakan maupun unit kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang membutuhkan dalam perbaikan ataupun peningkatan dimasa yang akan datang.

Jakarta, Juli 2019

ttd

Paryono, S.H., MAP
NIP. 197201101998031001

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar	ii
2. Daftar Isi	iii
3. Daftar Tabel.....	iv
4. Daftar Gambar	v
5. BAB I Pendahuluan	1
6. BAB II Penataan Tata Laksana	6
7. BAB III Penutup	30

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Rencana Aksi Penataan Tata Laksana	3
2. Tabel 2.1 Monitoring dan Evaluasi SOP	11
3. Tabel 2.2 Pemetaan Monitoring dan Evaluasi SOP Strategis	11
4. Tabel 2.3 Informasi Publik dalam bentuk Siaran Pers	12
5. Tabel 2.4 Aplikasi yang digunakan oleh Kantor Pusat BKN	21
6. Tabel 2.5 Aplikasi yang digunakan oleh Kantor Regional	24
7. Tabel 2.6 Aplikasi berbagi pakai tingkat nasional	26
8. Tabel 2.7 Aplikasi berbagi internal BKN	26
9. Tabel 2.8 SPBE BKN Tahun 2019	28
10. Tabel 2.9 Rencana Aksi Pengelolaan Kearsipan Tahun 2019	29

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Rapat Proses Bisnis	7
2. Gambar 2.2 Konsultasi Proses Bisnis	7
3. Gambar 2.3 Proses Bisnis Level 0	8
4. Gambar 2.4 Sub Proses Bisnis.....	8
5. Gambar 2.5 Peta Hubungan Antar Fungsi	9
6. Gambar 2.6 Peta Relasi Proses Bisnis	9
7. Gambar 2.7 Rapat Monev PPID	17
8. Gambar 2.8 Perka BKN Nomor 12 Tahun 2012	18
9. Gambar 2.9 Draft Revisi Perka BKN Nomor 12 tahun 2012	18
10. Gambar 2.10 Rapat Monev PTSP dan Pelatihan PTSP Online	19
11. Gambar 2.11 Hasil Evaluasi SPBE BKN Tahun 2018	20
12. Gambar 2.12 Sosialisasi Perpres No.39/2019	27
13. Gambar 4.2 Foto Kegiatan Sosialisasi Perpres No.39/2019	27

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai instansi yang mengemban amanat untuk mengelola manajemen kepegawaian ASN telah melakukan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dalam 9 (sembilan) tahun belakangan ini. Pelaksanaan reformasi birokrasi selalu dilakukan berbagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan kepegawaian pada setiap area perubahan. Salah satu area perubahan reformasi birokrasi yang memiliki program dan kegiatan melaksanakan serangkaian proses analisis dan perbaikan tata laksana yang bertujuan untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit kerja adalah **area perubahan penataan tata laksana**.

Secara khusus program kerja yang diamanatkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 16 Tahun 2016 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi BKN Tahun 2015 – 2019 untuk area Penataan Tata Laksana terdiri atas 3 hal, yaitu: (1) Program Proses Bisnis dan Prosedur Tetap (SOP) Kegiatan Utama, (2) Program e-Government, dan (3) Program Keterbukaan Informasi Publik. Setiap area Penataan Tata laksana terdiri atas beberapa program, diantaranya Program Proses Bisnis dan Prosedur Tetap (SOP) Kegiatan Utama, terdiri dari 2 kegiatan, yaitu: (1) Penyusunan proses bisnis dan (2) Monitoring dan evaluasi implementasi prosedur tetap (SOP). Untuk program *e-Government* yaitu kegiatan yang melakukan pengembangan aplikasi dalam rangka mendukung proses birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat aparatur sipil negara. Kemudian program Keterbukaan Informasi Publik meliputi 2 kegiatan, yaitu: (1) Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik, dan (2) Melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.

Rencana aksi penataan tata laksana berfokus kepada perbaikan

berdasarkan hasil evaluasi tahun 2018 terhadap area tata laksana yaitu reviu peta proses bisnis dan SOP, standar pelayanan, pelayanan terpadu serta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat belum diterapkan secara merata pada seluruh unit kerja pelayanan.

B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan peta proses bisnis instansi pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional prosedur Admnistrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian Negara 2015-2019;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015;
8. Standar internasional (International Organization for Standardization) ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu.
9. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/KEP/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi BKN sebagaimana

telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 66/KEP/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi BKN

C. Tujuan Penyusunan Laporan

Tim Kelompok Kerja Tata Laksana memiliki tugas membuat serta menyerahkan laporan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkesinambungan kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi BKN dan dilanjutkan penyerahan kepada Tim Kerja Reformasi Birokrasi Nasional. Tujuan penyusunan laporan kegiatan reformasi birokrasi kelompok kerja penataan tata laksana adalah penyampaian informasi dan data mengenai rencana aksi tahun 2019 (tabel 1.1)

Tabel 1.1
Rencana Aksi Penataan Tata Laksana
Tahun 2019

Agenda	Kegiatan	Capaian	Target Waktu
Penyusunan proses bisnis	Membuat proses bisnis level 0	Dokumen proses bisnis level 0	Januari s.d Desember 2019
	Membuat proses bisnis level 1	Dokumen proses bisnis level 1	
	Membuat proses bisnis level 2	Dokumen proses bisnis level 2	
Monitoring dan evaluasi implementasi SOP	Menginventarisir dan melakukan monitoring, evaluasi SOP di semua unit kerja	Laporan monitoring dan evaluasi	Januari s.d Desember 2019
	Melakukan monitoring dan evaluasi SOP yang terkait langsung dengan pelayanan kepegawaian: 1. Kedeputian Mutasi 2. Kedeputian Wasdal 3. PPSR 4. Puspenkom	Laporan monitoring dan evaluasi	

	Penyusunan SOP pelayanan terpadu satu pintu di Kantor BKN Pusat dan Kantor Regional BKN	Dokumen SOP PTSP	
Melakukan pengembangan E-Government	Menginventarisir aplikasi yang digunakan oleh kantor pusat BKN dan kanreg BKN	Laporan aplikasi yang dipakai	Januari s.d Desember 2019
Melakukan pengembangan E-Government	Menginventarisir aplikasi berbagi pakai baik tingkat nasional maupun internal BKN	Laporan aplikasi berbagi pakai	Januari s.d Desember 2019
	Pelaksanaan kegiatan SPBE tahun 2019 dan program percepatan integrasi sistem kepegawaian	Laporan SPBE tahun 2019 dan integrasi sistem kepegawaian	
Menerapkan kebijakan informasi publik	Memelihara konten informasi dan dokumentasi yang berhak diketahui masyarakat	Informasi Publik yang diunggah pada <i>Website official</i> BKN	Januari s.d Desember 2019
	Menyusun draft perubahan peraturan kepala BKN Nomor 12 tahun 2012 tentang pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi sesuai dengan perubahan SOTK BKN	Draft revisi PERKA BKN 2012	
	Memperbaharui informasi publik pada Website BKN	Informasi Publik di konten PPID Tahun 2018	
Monitoring dan evaluasi kebijakan informasi publik	Pengembangan Pelayanan Single Window berbentuk Pelayanan Kepegawaian Terpadu (PKT)		Januari s.d Desember 2019

	Memberikan pemahaman kepada pejabat PPID serta melakukan monitoring dan evaluasi informasi rutin, berkala dan yang dikecualikan	Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2018 serta Rapat PPID	
Pengelolaan Kearsipan	Melakukan SOP tentang Penyelenggaraan kearsipan	SOP penyelenggaraan kearsipan	Januari s.d Desember 2019
	Menyusun draft peraturan tentang penyelenggaraan kearsipan	draft peraturan BKN tentang penyelenggaraan kearsipan	Januari s.d Desember 2019

BAB II

PENATAAN TATA LAKSANA

A. PROSES BISNIS DAN PROSEDUR TETAP (SOP) KEGIATAN UTAMA

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah serta acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dimana peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Penyusunan peta proses bisnis terdiri dari peta proses bisnis level 0 merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses instansi pemerintah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses manajemen, dan proses bisnis pendukung. Sedangkan peta proses bisnis level 1 merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0.

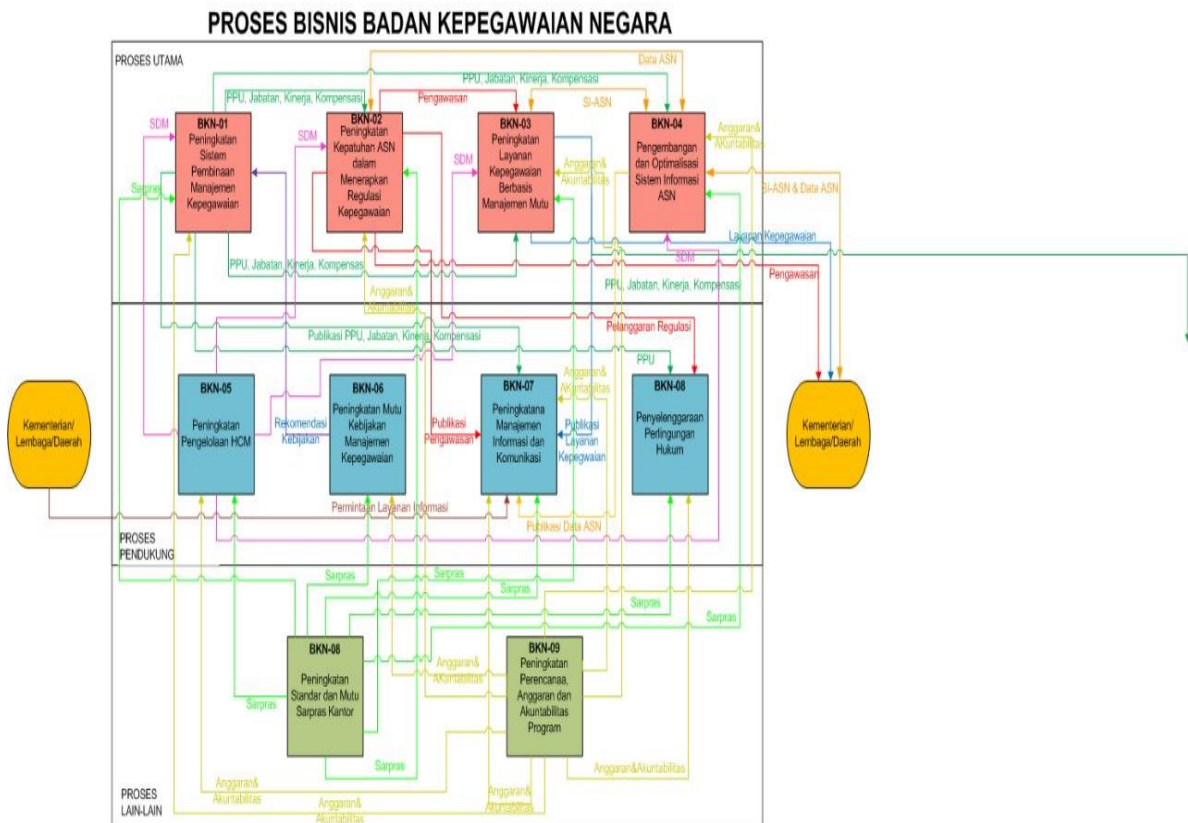
Tepatnya awal bulan Januari sampai dengan Juli 2019 tim kelompok kerja penataan tata laksana telah melakukan pembahasan mengenai peta proses bisnis level 0, sub proses bisnis, cross function map, peta relasi. Kemudian hasil pembahasan ditindak lanjuti dengan berkonsultasi ke pihak Kemenpan RB di Kedeputan Organisasi dan Tata Laksana guna memvalidasi draft yang telah disusun oleh tim, sebelum draf peta proses bisnis tersebut disahkan oleh pimpinan BKN.



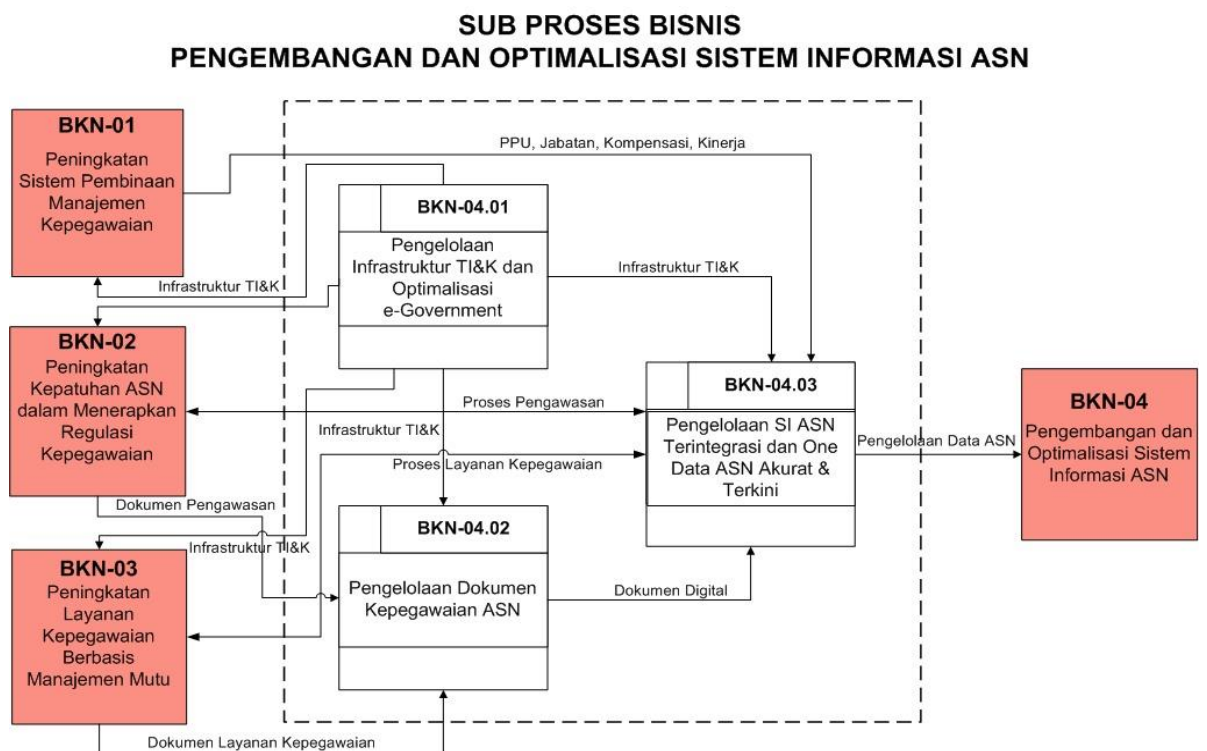
Gambar 2.1
Rapat Proses Bisnis Internal di Pokja Tata Laksana



Gambar 2.2
Konsultasi Proses Bisnis Anggota Pokja dan perwakilan Biro Kepegawaian BKN dengan Kementerian PAN RB

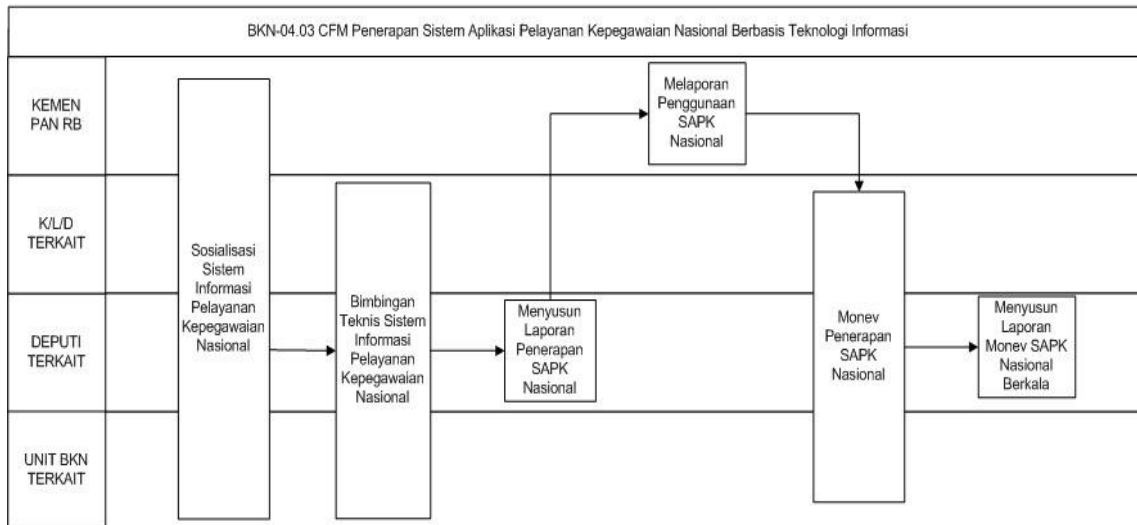


Gambar 2.3
Proses Bisnis Badan Kepegawaian Negara (Level 0)



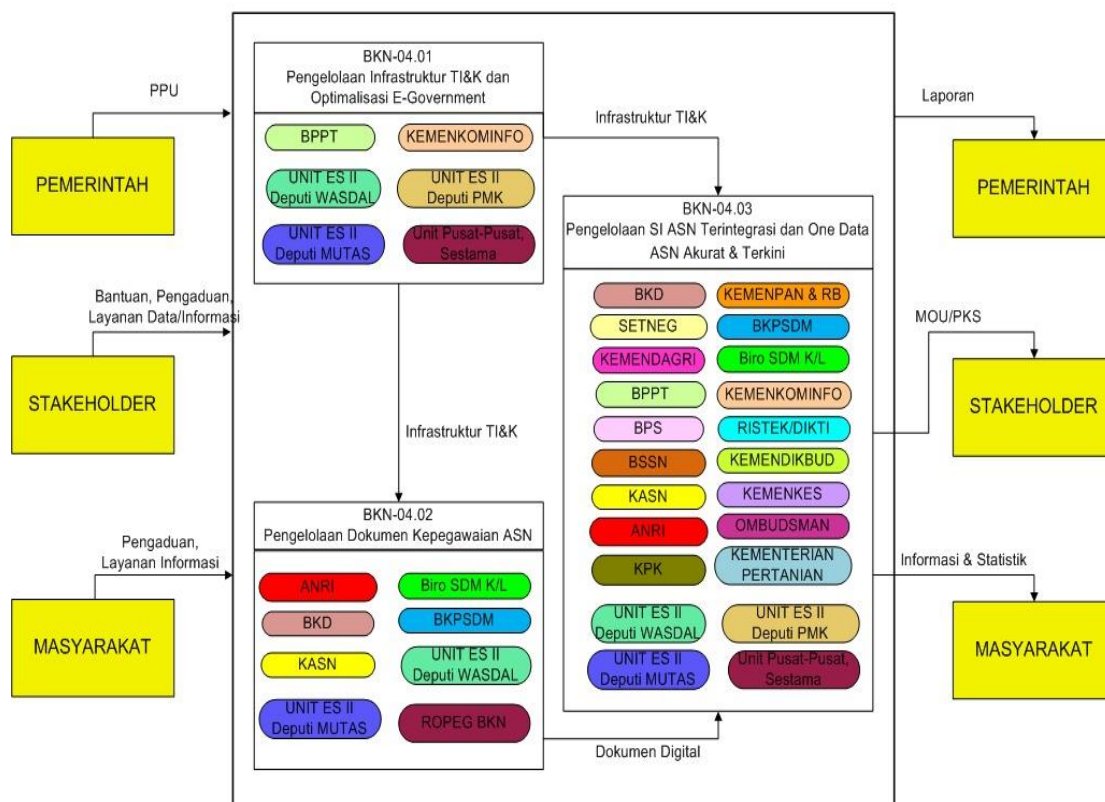
Gambar 2.4
Sub Proses Bisnis Kedeputan Sistem Informasi Kepegawaian ASN

CROSS FUNCTIONAL MAP DIREKTORAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN



Gambar 2.5
Cross Function Map (Peta Hubungan Antar Fungsi)

PETA RELASI DEPUTI BIDANG SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN



Gambar 2.6
Peta Relasi Proses Bisnis (Level 1)

Adapun penerapan prosedur tetap (SOP) perlu secara terus menerus dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga penyempurnaan terhadap SOP dapat dilakukan secara cepat sesuai kebutuhan. Proses ini harus diarahkan untuk membandingkan dan memastikan kinerja pelaksana sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam SOP, mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul, dan menentukan cara untuk meningkatkan hasil penerapan atau menyediakan dukungan tambahan untuk semua pelaksana. Monitoring dan evaluasi implementasi SOP secara regular dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun dan secara insidental dapat dilakukan sesuai kebutuhan organisasi. Ruang lingkup evaluasi SOP BKN yang telah dilakukan meliputi:

1. Pemeriksaan nomenklatur jabatan pelaksana dalam SOP sesuai dengan SOTK BKN berdasarkan Perka BKN Nomor 19 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perka BKN No. 31 tahun 2015 dan Perka BKN Nomor 39 tahun 2014 tentang Jabatan di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, sehingga terjadi perubahan tugas pokok dan fungsi yang disesuaikan dengan perubahan nomenklatur dan jabatan.
2. Pemeriksaan standar pembuatan dan penulisan SOP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. Kriteria atau indikator keberhasilan yang digunakan sebagai berikut:
 - Format penulisan identitas SOP diperiksa dan sudah sesuai
 - Nama jabatan pelaksana kegiatan di SOP diperiksa dan sudah sesuai
 - Penulisan simbol-simbol flowchart SOP diperiksa dan sudah sesuai
 - Substansi kegiatan diperiksa dan sudah sesuai dengan alur kegiatan yang ideal
 - Efektifitas dan efisiensi alur kegiatan
 - Penerbitan dokumen SOP yang sudah diperiksa dan sudah sesuai serta disahkan oleh Kepala unit kerja
 - Hasil evaluasi dilaporkan kepada atasan untuk ditindaklanjuti

Agenda monitoring dan evaluasi SOP telah dilakukan yaitu bulan Januari hingga Maret 2019 memonitoring implementasi SOP dengan capaian kinerja di bulan Juli 2019 menghasilkan asistensi penyempurnaan SOP (tabel 1.2)

Tabel 2.1
Monitoring dan Evaluasi SOP Unit Kerja dan Satuan Kerja
Tahun 2019

No	Unit Kerja
1.	Biro Kepegawaian
2.	Kantor Regional III BKN Bandung
3.	Kantor Regional IX BKN Jayapura
4.	Kantor Regional XII BKN Aceh
5.	Kantor Regional XIV BKN Manokwari

Pada semester berikutnya akan melaksanakan pemetaan dan fokus pada evaluasi SOP strategis yang terkait langsung dengan SOP pelayanan terpadu satu pintu meliputi:

Tabel 2.2
Pemetaan Monitoring dan Evaluasi SOP Strategis
Tahun 2019

No	Unit Kerja
1.	Kedeputian Mutasi
2.	Kedeputian WASDAL
3.	PPSR
4.	PUSPENKOM

B. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Layanan informasi publik dilakukan melalui media sosial (medsos) akun resmi BKN seperti Facebook dan twitter (@bkngoid) serta instagram (@bkngoidofficial). Selain medsos informasi publik bisa diakses melalui berita di Website BKN (<http://bkn.go.id>) maupun dari kunjungan langsung ke BKN yang dilakukan masyarakat maupun instansi atau fasilitasi audiensi dari lembaga lainnya.

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di lingkungan BKN dilakukan melalui Biro Humas dengan memberikan layanan informasi BKN. Salah satu bentuk Pelayanan Informasi berdasar kelompok informasi yang bersifat publik disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat dilayani melalui website BKN, diantaranya terdiri atas Berita dan Peraturan Hukum (Peraturan maupun Keputusan Kepala BKN). Berikut layanan informasi publik melalui Website BKN diantaranya Berita <http://www.bkn.go.id/berita> sepanjang tahun 2018 terdiri dari 399 berita, Siaran Pers sebanyak 66 (tabel 1.4).

Tabel 2.3
Informasi Publik dalam bentuk Siaran Pers
Tahun 2018

No	Tanggal	Siaran Pers yang di unggah di Website BKN
1	19/12/2018	Usul Penetapan NIP CPNS 2018
2	7/12/2018	8 Desember 2018, SKB CPNS Serentak di 59 Titik Lokasi
3	24/11/2018	SKB CPNS 2018 Digelar Awal Desember 2018,Instansi Daerah Wajib Pakai CAT
4	22/11/2018	Pemerintah Ingin Cetak PNS dengan Mindset Revolusi Industri 4.0
5	14/11/2018	WB Global Report CAT BKN Dinobatkan sebagai Produk Unggul Pemerintah Indonesia dalam Reforming Civil Service Recruitment

6	06/11/2018	<u>BKN akan Verifikasi Usul Penetapan Status Kepegawaian ASN Korban Lion JT610PK-LQ</u>
7	24/10/2018	<u>SKD CPNS 2018 akan Digelar di 269 Lokasi, Tamu Dua Hal yang Wajib Dibawa</u>
8	23/10/2018	<u>Implementasi Ketentuan Regulasi Atas ASN Tipikor Inkracht akan Terus Dikedepankan Tanpa Pandang Bulu</u>
9	23/10/2018	<u>Seleksi CPNS Berbasis Komputer Dilaksanakan Serentak Mulai Pekan Keempat Oktober 2018</u>
10	19/10/2018	<u>Pacu Layanan Kepegawaian Provinsi Lampung, BKN Resmikan UPT ke-XVI di Lampung</u>
11	16/10/2018	<u>Pendaftaran SSCN Ditutup 15 Oktober 2018, Berikut 9 (sembilan) Fakta Menarik yang Terjadi Sepanjang Masa Pendaftaran</u>
12	11/10/2018	<u>situ 4.834 Tenaga Honorer Eks K-II Sudah Menyerahkan Jalur Formasi Khusus CPNS 2018</u>
13	03/10/2018	<u>Pendaftaran SSCN Dekatpanjang</u>
14	28/9/2018	<u>111.294 Akun Terbentuk, Prodi PGSD Dominasi Pendaftar Hari Ketiga SSCN</u>
15	28/9/2018	<u>Persiapan Seleksi CPNS 2018 dan Kolaborasi Empat Institusi Pemerintah</u>
16	27/9/2018	<u>Top 10 K/L/D Dengan Peminat Terbanyak Dalam Masa Registrasi CPNS 2018</u>
17	26/9/2018	<u>Pelamar CPNS 2018 Sudah Dapat Melamar ke 245 Instansi via Portal SSCN</u>
18	21/9/2018	<u>Sebanyak 87,4% K/L/D Pembuka Rekrutmen CPNS Telah Menginput Syarat dan Formasi Jabatan dalam Portal SSCN</u>
19	20/9/2018	<u>Syarat dan Formasi Jabatan CPNS 2018 dari 72 KLD</u>
20	19/9/2018	<u>Portal sscn.bkn.go.id Sudah Dapat Diakses, Pendaftaran Paling Cepat Dimulai 26 September 2018</u>

21	18/9/2018	<u>SP 19 September 2018 SSCN Siap Diakses, Pelamar Dipersilakan Cermati Syarat dan Formasi Jabatan CPNS yang Dapat Dilamar</u>
22	18/9/2018	<u>BKN menjadi Inisiator Terbentuknya Database ASN</u>
23	17/9/2018	<u>9 (Sembilan) Syarat Dasar Bagi Pelamar CPNS 2018</u>
24	14/9/2018	<u>BKN-Kemendagri-KemenPANRB Sepakati Komitmen Percepat Pemberhentian 2.357 PNS Tipikor</u>
25	13/9/2018	<u>SIARAN PERS UPDATE – PNS Tipikor Inkracht Aktif Bekerja di Pemerintah Daerah</u>
26	6/9/2018	<u>Pacu Layanan Kepegawaian Provinsi Kepri, BKN Operasikan UPT ke-15 di Batam</u>
27	6/9/2018	<u>Penerimaan CPNS 2018 Dibuka, 19 September 2018, Portal SSCN BKN Siap Diakses Pelamar</u>
28	4/9/2018	<u>Pertajam Penyikapan atas PNS Tipikor</u>
29	6/8/2018	<u>PNS tipikor per 31 juli</u>
30	27/7/2018	<u>ASN Korupsi yang Diblokir BKN Tercatat di 56 Instansi Pemerintah</u>
31	17/7/2018	<u>Optimalkan Kinerja Kepegawaian di Kalteng, UPT BKN Palangka Raya Resmi Berdiri</u>
32	16/7/2018	<u>Cegah Kerugian Negara, BKN Blokir 188 ASN Korupsi</u>
33	11/7/2018	<u>Deputi Sinka BKN : Seleksi CPNS2018, SKD dan SKB Gunakan CAT BKN dan Tidak Ada Lagi Portal Registrasi Mandiri</u>
34	11/7/2018	<u>35 Instansi Pemerintah Pengelola Kepegawaian Terbaik Terima Anugerah BKN Award 2018</u>
35	6/7/2018	<u>Berikut ini 7 Kriteria Bagi Instansi Pemerintah yang Laik Dianugerahi BKN Award 2018</u>
36	4/7/2018	<u>Ralat – Mekanisme Seleksi CPNS Terintegrasi, Jadi Special Issue Rakornas Kepegawaian 2018</u>

37	3/7/2018	<u>Jelang Rakornas Kepegawaian 2018, Calon Peserta Harus Mendaftar pada Portal rakornas.bkn.go.id</u>
38	25/6/2018	<u>3 Permasalahan terbesar keluhan Pelamar CPNS TA 2017, Pelajari dan Antisipasi Jelang Pembukaan CPNS 2018</u>
39	12/6/2018	<u>BKN Siapkan Infrastruktur Penerimaan CPNS 2018</u>
40	7/6/2018	<u>Data Pengaduan pada LAPOR-BKN hingga Mei 2018</u>
41	18/5/2018	<u>Enam Aktivitas Ujaran Kebencian Berkategori Pelanggaran Disiplin ASN</u>
42	2/5/2018	<u>BKN Gandeng KPK Berantas PNS Tipikor</u>
43	1/5/2018	<u>Peta Persaingan Sekolah Kedinasan 2018 Berubah</u>
44	30/4/2018	<u>Jelang Tutup Pendaftaran, Pelamar pada 5 Sekolah Kedinasan ini Bersaing Ketat</u>
45	20/4/2018	<u>Siapkan Data Akurat, BKN Susun Indeks Profesionalitas ASN</u>
46	13/4/2018	<u>Dukung Percepatan Pembangunan Wilayah Timur Indonesia, BKN Jangkau Layanan Kepegawaian Papua</u>
47	12/4/2018	<u>Pelamar Dikdin 2018 Capai 40 Ribu Orang</u>
48	5/4/2018	<u>PNS Yang Tidak Diberikan Cuti Bersama Karena Tugas Jabatan, Hak Cutinya Ditambahkan ke Dalam Cuti Tahunan</u>
49	29/3/2018	<u>Sekolah Kedinasan Dibuka 9 April 2018</u>
50	14/3/2018	<u>Penjelasan Gaji dan CAP (Cuti Alasan Penting)</u>
51	9/3/2018	<u>PNS Laki-laki Dapat Ajukan Cuti Dampingi Istri Bersalin, Bentuk Dukungan Pemerintah Dalam Pengarusutamaan Gender</u>
52	27/2/2018	<u>BKN Lakukan Kajian Kenaikan Gaji PNS 2019 (revisi 2)</u>
53	27/2/2018	<u>Awas Penipuan, Tidak Ada Tes CPNS Honorer K2 dan Umum!</u>
54	26/2/2018	<u>BKN Raih Procurement Award Pengadaan Barang Jasa</u>

		Pemerintah
55	23/2/2018	SIARAN PERS Putusan Final Sidang Bapek Februari 2018: Sebanyak 36 PNS Diberhentikan
56	22/2/2018	BKN Sasar 2.500 JPT Pratama dan Administrator dalam Penyusunan Talent Pool 2018
57	12/2/2018	Skema Gaji
58	7/2/2018	Sebanyak 1.759 PNS Dijatuhi Hukuman Disiplin Pada Tahun 2017
59	5/2/2018	Rakorpeg Kantor Regional VII BKN Palembang
60	1/2/2018	CPNS Kantungi NIP Tidak Otomatis Diangkat Menjadi PNS
61	31/1/2018	World Bank Indonesia Tetapkan CAT BKN Sebagai Top 10 World Bank Global Report on Public Sector Performance
62	19/1/2018	Terbukti Korupsi – 83 PNS Aktif di Sulut harus Diberhentikan
63	12/1/2018	Update Penetapan NIP CPNS 2017
64	11/1/2018	Inpassing JFT BKN
65	10/1/2018	belum ada pengumuman resmi rekrutmen CPNS 2018
66	4/1/2018	update usul masuk NIP CPNS 2017

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan melalui kegiatan PPID dan pengembangan pelayanan *single window* berbentuk Pelayanan Kepegawaian Terpadu (PKT).

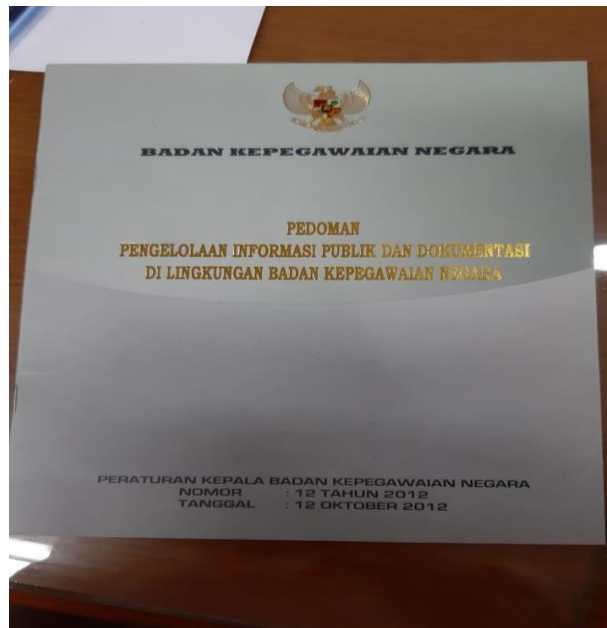
Kegiatan Monev PPID antara lain evaluasi dalam upaya peningkatan pelayanan Publik dengan tujuan mengembangkan layanan sesuai standar pelayanan informasi keterbukaan publik meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), Regulasi, Infrastruktur dan Informasi Wajib. Untuk SDM dengan cara mengaktifkan kembali fungsi Pengelola Informasi Satuan Kerja (PIS) untuk membantu PPID sebagai petugas

penghubung yang menyumbangkan informasi dari unit kerjanya. Dalam hal infrastruktur adanya ruangan pelayanan PPID berupa ruangan sekretariat PPID dan perlu digagas ePPID. Untuk Regulasi tentang Penetapan Informasi yang dikecualikan di lingkungan BKN sesuai dasar peraturan Perka BKN Nomor 12 Tahun 2012 (uji Konsekuensi) dipandang belum memenuhi kategori informasi publik.

Atas dasar pembagian kategori tersebut pada Perka BKN Nomor 12 Tahun 2012 maka perlu adanya revisi Perubahan Perka BKN dengan sasaran memberikan pemahaman yang lebih tajam dari pengelola informasi dan dokumentasi dari unit dilingkungan BKN maupun Kantor Regional dalam menyusun strategi pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tepat.



Gambar 2.7
Rapat Monev PPID Tahun 2018



Gambar 2.8
Perka BKN Nomor 12 Tahun 2012

PERBANDINGAN PERKA NOMOR 12 TAHUN 2012 DENGAN DRAFT REVISI PERKA NOMOR 12 TAHUN 2012

ASLI	REVISI/PERUBAHAN HASIL RAPAT PPID MARET 2017
I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam kelangsungan organisasi Badan Kepegawaian Negara. Penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan masing-masing satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam mengelola informasi publik dan dokumentasi bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi, maka disusun pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.	I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi. Pengelolaan informasi publik dan dokumentasi diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dalam kelangsungan organisasi Badan Kepegawaian Negara. Penerapan prinsip-prinsip <i>good governance</i> ini pada dasarnya sangat tergantung pada kesiapan masing-masing satuan kerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dalam mengelola informasi publik dan dokumentasi bagi masyarakat. Untuk itu, sebagai upaya menciptakan dan menjamin kelancaran dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi, maka disusun pedoman pengelolaan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Gambar 2.9
Draf Revisi Perka BKN Nomor 12 Tahun 2012

Kegiatan monev lainnya dilakukan melalui Pengembangan pelayanan *single window* berbentuk Pelayanan Kepegawaian Terpadu (PKT) melalui PSPT Online. Dengan PTSP Online diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan BKN terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun Non PNS. Selanjutnya, PTSP Online dapat dikembangkan

agar petugas pada unit kerja terkait mendapatkan notifikasi jika ada pengunjung yang hadir. Pengunjung pada PKT mendapatkan pelayanan yang diperlukan dalam bidang administrasi serta konsultasi kepegawaian yang terbagi menjadi enam loket yaitu A, B, C, D, E, dan F. Loker A melayani Pengadaan dan Kepangkatan, Loker B melayani pensiun PNS dan Pejabat Negara, Loker C melayani Status Kepegawaian, Rekrutmen dan Seleksi CAT, Loker D melayani Pengawasan Kepegawaian/Wasdal dan Pertimbangan Kepegawaian/Bapek, Loker E melayani Informasi Kepegawaian/Inka dan Penilaian Kompetensi ASN serta Loker F melayani Penyerahan Berkas dan Tandatangan SPPD.

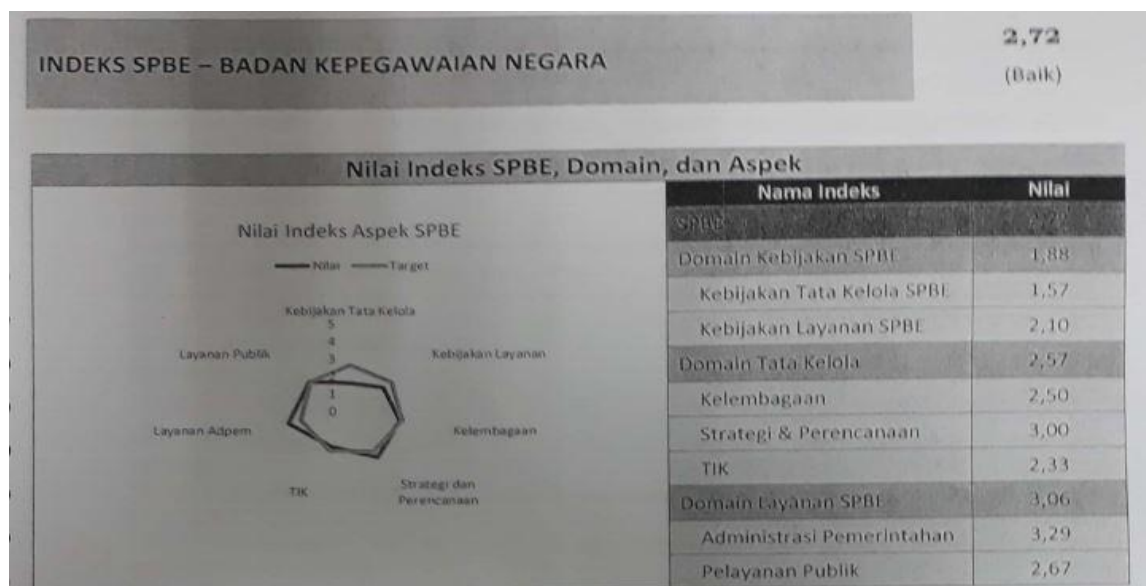


Gambar 2.10
Rapat Monev PTSP dan Pelatihan PTSP Online

C. E-GOVERNMENT

Pemerintahan elektronik (*e-government*) adalah penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait. Manfaat pemerintahan elektornik adalah (1) Memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui layanan informasi yang lebih fleksibel, tanpa batasan waktu dan tempat, dan (2) Melaksanakan kegiatan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien, terutama dalam pelaksanaan koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan SPBE di lingkungan BKN telah diatur melalui Surat Edaran Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 04/SINKA/V/2019 tentang mekanisme penyajian dan pemanfaatan data serta informasi aparatur sipil negara dan Surat Edaran Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor: 05/SINKA/V/2019 tentang mekanisme pembangunan aplikasi di unit kerja Badan Kepegawaian Negara. (terlampir indeks SPE BKN)



Gambar 2.11
Hasil hasil evaluasi SPBE BKN tahun 2018

Sehingga tahun 2019 kelompok kerja penataan tata laksana dan unit terkait merencanakan program peningkatan SPBE di lingkungan BKN dengan beberapa program sebagai berikut:

1. Menginventarisir aplikasi yang digunakan oleh kantor pusat BKN dan kantor regional BKN. Adapun aplikasi yang digunakan pada Kantor Pusat pada tabel 2.4 dan untuk Kantor Regional pada Tabel 2.5.

Tabel 2.4
Aplikasi yang digunakan oleh Kantor Pusat BKN

No	Aplikasi	Keterangan
1.	Aplikasi E-Office	Layanan aplikasi paperless dalam administrasi perkantoran, korespondensi setiap karyawan/pejabat
2.	Mailtracking	Aplikasi pengelolaan korespondensi
3.	E-Notula	Layanan aplikasi untuk mewujudkan administrasi perkantoran yang terintegrasi melalui teknologi informasi
4.	Aplikasi Informasi Pelayanan Pengadaan dan Kepangkatan	Aplikasi pengelolaan Karis, Karsu dan Karpeg
5.	Sistem Verifikasi dan Validasi data PNS (PUPNS)	Aplikasi pendataan ulang PNS dalam rangka peremajaan data PNS
6.	Sistem Aplikasi Penyelesaian Kasus Status	Aplikasi pengelolaan permasalahan status dan kedudukan kepegawaian
7.	Aplikasi DUPAK	Aplikasi penghitungan angka kredit jabatan fungsional
8.	Aplikasi Manajemen Assessment Center	Aplikasi pengelolaan data penilaian kompetensi
9.	SAPK	Aplikasi layanan manajemen kepegawaian (peremajaan data, pengadaan, mutasi, pensiun)
10.	HRM	Aplikasi pengelolaan HRM instansi
11.	EIS	Dashboard penyajian data PNS khusus level pimpinan tinggi
12.	DMS	Aplikasi pengelolaan dokumen digital kepegawaian
13.	NCISS	Aplikasi manajemen kepegawaian terintegrasi
14.	PDM	Aplikasi pengelolaan data pensiun secara mandiri
15.	Aplikasi Assessment Center ASN	Aplikasi penilaian kompetensi PNS
16.	SSCN	Aplikasi pendaftaran CPNS, PPPK dan Pendidikan Kedinasan Nasional
17.	Talent Pool	Aplikasi pengelolaan portofolio jabatan pimpinan tinggi

18.	Sistem Aplikasi Perencanaan Kepegawaian	Aplikasi perencanaan kebutuhan pegawai
19.	Aplikasi blokir	Aplikasi terkait pemblokiran PNS yang dijatuhi hukuman
20.	MySAPK	Aplikasi manajemen ASN berbasis andriod (profil PNS, riwayat, peremajaan data)
21.	SI ASN	Aplikasi manajemen kepegawaian ASN terintegrasi
22.	CAT	Aplikasi seleksi CPNS Nasional
23.	Aplikasi Manajemen Diklat	Aplikasi pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai BKN
24.	E-Portal Pusbang	Aplikasi yang menyajikan informasi kegiatan di Pusbang
25.	E-Learning	Aplikasi pendukung pembelajaran jarak jauh versi 2
26.	E—Pusbang	Penyaji informasi elektornik layanan dan kegiatan pengembangan kepegawaian
27.	SIKAP	Aplikasi pengelolaan tunjangan kinerja PNS BKN
28.	Absensi	Aplikasi pengelolaan absensi pegawai
29.	Aplikasi E-Audit Inspektorat	Aplikasi pengawasan internal pemerintah
30.	E-Lakip Renkal	Aplikasi pengelolaan pelaporan akuntabilitas kinerja program instansi
31.	Aplikasi Monitoring Penyerapan Anggaran	Aplikasi pengelolaan penyerapan anggaran instansi
32.	Aplikasi Tunjangan	Aplikasi pengelolaan tunjangan
33.	SIAVA	Aplikasi yang bertujuan untuk mewujudkan dokumen pertanggung jawaban keuangan yang akuntabel dan transparan berbasis teknologi informasi
34.	SIPEPI	Aplikasi yang menyediakan data penggajian dan penghasilan lain-lain.
35.	Aplikasi E-Kinerja ASN	Aplikasi yang menyediakan data kinerja ASN untuk mengukur dan memantau kinerja ASN secara periodik dan acuan pemberian tunjangan kinerja versi 2
36.	Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi	Aplikasi yang menyediakan data kinerja ASN untuk mengukur dan memantau kinerja ASN secara periodik dan acuan

		pemberian tunjangan kinerja versi 1
37.	SIONI	Aplikasi tentang pengelolaan serta informasi habis pakai
38.	Aplikasi Aset Bergerak	Aplikasi pengelolaan aset instansi
39.	Aplikasi Manajemen Penyelesaian Hukum	Aplikasi pengelolaan permasalahan hukum kepegawaian
40.	Wistle Blowing System	Aplikasi untuk menerima laporan atau pengaduan atas suatu tindakan, perbuatan yang terindikasi adanya pelanggaran terhadap implementasi norma, standar, kriteria ASN di instansi pemerintah
41.	E-Media pelayanan publik	Aplikasi penyajian informasi internal BKN
42.	Aplikasi Anjungan	Aplikasi pelayanan kepegawaian otomatis
43.	Aplikasi Pelayanan satu pintu	Aplikasi pencatatan pengaduan permasalahan kepegawaian terpadu
44.	Aplikasi Poliklinik BKN	Aplikasi pengelolaan administrasi layanan kesehatan pegawai BKN
45.	Aplikasi Perencanaan Terpadu	Aplikasi pengelolaan rencana dan program kegiatan instansi
46.	Aplikasi Penyusunan Takah Pensiun	Aplikasi pengelolaan dokumen kepegawaian PNS yang memasuki purnabakti
47.	Aplikasi Pencatatan dan Rekap Pajak Honor	Aplikasi pengelolaan pencatatan dan rekap pajak honor
48.	Aplikasi SIMWASDALPEG	Aplikasi pengawasan dan pengendalian pegawai ASN
49.	Aplikasi Pengelolaan Jabatan Fungsional	Aplikasi Pengelolaan Jabatan Fungsional
50.	Aplikasi Peserta Rakornas BKN	Aplikasi pendaftaran peserta Rakornas BKN
51.	Aplikasi Web E-Learning	Aplikasi pendukung pembelajaran jarak jauh versi 1
52.	JDIH	Aplikasi kumpulan peraturan
53.	Ejournal	Aplikasi kumpulan jurnal
54.	Presensi	Aplikasi layanan monitoring absensi pegawai secara mandiri
55.	Sipendekar	Aplikasi layanan pengajuan cuti pegawai

Tabel 2.5
Aplikasi yang digunakan oleh Kantor Regional

No	Kantor Regional	Aplikasi
1.	I	1. Aplikasi Tata Naskah 2. Aplikasi Monitoring Tamu 3. Aplikasi Mail Tracking 4. Aplikasi Karpeg Karis Karsu 5. Aplikasi Tata Naskah Dinas 6. Sistem Aplikasi Pelayanan Paperless
2.	II	1. TAKTRONIK (Tata Naskah Elektronik) 2. AREK (Aplikasi Rekonsiliasi) 3. MBONEK
3.	III	1. Portal Web Kanreg 3 2. Sistem Perbaikan data Konversi 3. MailTracking 4. Aplikasi Indeks Kepuasan Pelayanan 5. Sangkuriang by AREK 6. Sistem Aplikasi Transfer Dokumen 7. Sistem Informasi Pensiun Janda Duda 8. Aplikasi pencetakan karis dan karsu 9. Aplikasi pencatatan dokumen kenaikan pangkat 10. Aplikasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 11. Aplikasi SIPMA
4.	IV	Aplikasi pengiriman dokumen pensiun
5.	V	1. Integrated Mail Application (IMA) 2. E-Workshop 3. Takah Internal 4. Aplikasi Scan Usulan
6.	VI	1. PPT+IKM 2. Takah (E-PAK) on-progress 3. Buku Tamu/IKM 4. WBS Kanreg 5. Aplikasi Kinerja Kanreg
7.	VII	1. K3 (Karpeg/Karis/Karsu) 2. Tamu 3. Regulasi 4. WEB BKN7 5. Sibaper 6. Mail Tracking

8.	VIII	1. Mailing flow application 2. E-regulation 3. Aplikasi Supervisi Kepegawaian ASKAP3K 4. Sistem Informasi Surat UPT BKN Palangkaraya 5. Aplikasi Pelayanan Konversi NIP 6. Aplikasi Pensiun Janda Duda 7. Si APEK Online (aplikasi pelayanan Karpeg/Karis/Karsu) 8. Website Kantor Regional VIII
9.	IX	1. E-PPT (elektronik pusat pelayanan terpadu) 2. EK3 (elektronik Karpeg-Karis-Karsu) 3. IKP (indeks kepuasan pelayanan) 4. SiETA (sistem informasi tata naskah) 5. SiLAKI (sistem informasi laporan kinerja) 6. eMAP (elektronik Peta ASN) 7. Website Kanreg IX BKN Jayapura
10.	X	1. Digital peraturan 2. Aplikasi pendukung KPO-PPO Lesspaper 3. E-Agenda 4. E-notulen 5. WBS 6. Evaluasi output layanan kepegawaian 7. X-asik
11.	XI	1. Aplikasi dokumen kontrol kenaikan pangkat 2. Aplikasi dokumen kontrol pensiun 3. Aplikasi SMS pengingat peminjaman tata naskah 4. Aplikasi broadcast message 5. Aplikasi konsultasi kepegawaian 6. Aplikasi antrian 7. Aplikasi indeks kepuasan masyarakat 8. Aplikasi dokumen sistem manajemen 9. Aplikasi tata naskah 10. Aplikasi pelayanan terpadu satu pintu 11. Aplikasi buletin digital informasi kepegawaian 12. Aplikasi SPPD 13. Aplikasi inventory request information system
12.	XII	1. SELAIS (sistem elektronik layanan ASN dan informasi persuratan) 2. SISKAS (sistem informasi SMS kepegawaian) 3. WBS-XII 4. Anjungan informasi
13.	XIII	1. E-agenda pensiun 2. Aplikasi karpeg karis karsu 3. Website Kanreg XIII BKN
14.	XIV	Aplikasi pengiriman dokumen

2. Menginventarisir aplikasi berbagi pakai baik tingkat nasional maupun internal. Adapun aplikasi tersebut pada tabel 2.6 dan 2.7

Tabel 2.6
Aplikasi berbagi pakai internal BKN

No	Aplikasi	Keterangan
1.	AREK	Aplikasi pengelolaan pelayanan kepegawaian
2.	DES	Aplikasi pengelolaan penilaian kinerja harian
3.	PDM	Aplikasi pengelolaan data PNS pensiun
4.	DMS	Aplikasi pengelolaan dokumen digital kepegawaian

Tabel 2.7
Aplikasi berbagi pakai tingkat nasional

No	Aplikasi
1.	SAPK
2.	SSCASN (CPNS, P3K, Dikdin)
3.	My SAPK
4.	e-DUPAK
5.	PUPNS
6.	CAT
7.	NCIS
8.	HRM
9.	SI-ASN
10.	Helpdesk (SSCASN)
11.	Talent Pool JPT

3. Pelaksanaan kegiatan SPBE tahun 2019 dan program percepatan integrasi sistem kepegawaian.

Dalam rangka menunjang peningkatan SPBE BKN, maka BKN telah melakukan penyusunan draft peraturan perundang-undangan terkait sistem dan aplikasi yang terdapat di BKN sejumlah 5 (lima) draft peraturan (terlampir).

Selain itu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Adapun rencana kegiatan sistem pemerintahan berbasis elektronik tahun 2019 dan program percepatan integrasi sistem kepegawaian, antara lain:

- a) Kebijakan pembagian peran fasilitator
- b) Perencanaan target integrasi instansi
- c) Pengembangan service sesuai kebutuhan layanan kepegawaian
- d) Pengembangan teknologi integrasi berbasis Micro Services
- e) Pengembangan integrasi dokumen digital dan DSS
- f) Peningkatan kerjasama



Gambar 2.12
Sosialisasi Perpres No.39/2019

Tabel 2.8 SPBE BKN Tahun 2019

No	Kegiatan		Tahun	Jenis Dokumen
I.	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
1.	Kebijakan/Peraturan	Draft Perban Sistem Rekrutment Terintegrasi	2019	Draft
		Draft Perban Interoperabilitas Data	2019	Draft
		Draft Perban Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kepegawaian	2019	Draft
		Draft Perban MySAPK-New	2019	Draft
		Draft Perban KPE Virtual	2019	Draft
2.	Tata Kelola			
	a. Rencana Induk SPBE	Penyusunan Rencana Implementasi Integrasi Nasional	2019	Draft
		Penyusunan Rencana Merit Sistem	2019	Draft
	b. Pusat Data	Pemanfaatan Data ASN		
		MOU dan PKS	2018-2019	Daftar MOU & PKS, Draft
		Penyajian Informasi :		
		a. Dashboard SSCN	2018-2019	Manual, Alur
		b. Dashboard PPPK	2019	Manual, Alur
	c. Integrasi	Jumlah instansi terintegrasi SIMPEG-SAPK	2018-2019	Daftar instansi
		Jumlah layanan (service) yang dikembangkan oleh BKN	2018-2019	Daftar Service API, Buku Panduan
		Penyusunan Instrument Survey Kesiapan	2019	Instrument Kuisioner

		SIMPEG Instansi		
		Pembangunan Aplikasi Survey Online	2019	Manual Book
	d. Aplikasi Berbagi Pakai	NASIONAL :		
		SSCASN	2019	Manual Book, List Instansi
		SSCN	2018-2019	Manual Book, List Instansi
		SSPPPK	2019	Manual Book, List Instansi
		SSDIKIN	2019	Manual Book, List Instansi
		HELPDESK SSCN	2018-2019	Manual Book
		HELPDESK PPPK	2019	Manual Book
		HELPDESK DIKIN	2019	Manual Book
		SIASN	2018	Laporan
		Aplikasi Pengolahan Nilai SSCN	2018-2019	Manual Book, List Instansi
		Aplikasi DS	2018-2019	Manual Book, List Instansi
		MySAPK	2018-2019	Manual Book
		MERIT SISTEM	2019	Struktur Data
	3. Layanan SPBE			

	(Aplikasi)			
	a. Inventarisir Aplikasi di BKN Pusat	Daftar Aplikasi di Kantor Pusat BKN	2019	Daftar, Manual Book/Dokumentasi Sistem
	b. Inventarisir Aplikasi di Kanreg BKN	Daftar Aplikasi di Kantor Regional BKN	2019	Daftar Aplikasi
	c. Layanan Aplikasi Manajemen ASN	Pengembangan Modul Pensiun Less Paper, Instansi yang sudah menerapkan Pensiun Less Paper	2018	Perka BKN, Panduan, Daftar instansi
	d. Aplikasi SPBE BKN	Aplikasi SPBE BKN	2018-2019	Manual Book, SOP

4. Pengelolaan Kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan faktor penunjang penyelenggaraan pemerintahan dalam hal tata kelola naskah kepegawaian. Pada tahun 2017 BKN telah mendapatkan hasil evaluasi pengelolaan kearsipan dengan nilai 17 dalam skala 100. Untuk tahun 2018 sampai dengan pelaporan ini belum mendapatkan nilai (Juli 2019). Adapun pada tahun 2019 kegiatan peningkatan pengelolaan kearsipan BKN sebagai berikut:

1. SOP penyelenggaraan kearsipan yang berbentuk SOP *record center*
2. Draf peraturan BKN tentang penyelenggaraan kearsipan.

Tabel 2.9
Rencana Aksi Pengelolaan Kearsipan
Tahun 2019

No	Rencana Aksi
1.	Draft Perban Tata Naskah Dinas (TND)
2.	Draft Perban Jadwal Retensi Arsip (JRA)
3.	Draft Perban Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD)
4.	Draft SOP Record Center
5.	Surat Perintah Pendataan Buku Induk PNS

Untuk kegiatan lainnya akan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2019.

BAB III

PENUTUP

Pada bulan Juli 2019 pencapaian program dan kegiatan penataan tata laksana mencapai kondisi yang telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Maka sebagai langkah selanjutnya tim penataan tata laksana akan melakukan tahapan penyempurnaan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan sampai dengan akhir tahun 2019.

Dalam penyempurnaan agenda penataan tata laksana perlu kiranya dukungan seluruh kelompok kerja lainnya, unit kerja dan mitra kerja yang terkait dengan ketatalaksanaan. Oleh karena itu, kami tim penataan tata laksana menyampaikan terima kasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan untuk keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam area penataan tata laksana.